

e-ISSN 3025-8030 : p-ISSN 3025-6267

Vol. 1, No. 3, 2024



Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
AMPOEN
Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat

JURNAL AMPOEN

Vol. 1, No. 3, 2024

Halaman: 191-197

DINAMIKA KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS NEGARA

M. Reyza Zulhidayat, Suharni Haris, Oksahil, Restiawati, Ahmad Dahlan Al Haris

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i3.1123>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Zulhidayat, M. R., Suharni Haris, Oksahil, Restiawati, & Ahmad Dahlan Al Haris. (2024). DINAMIKA KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS NEGARA. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (3), 191–197. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v1i3.1123>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (**Jurnal AMPOEN**): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (**CC-BY-SA**) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





DINAMIKA KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS NEGARA

**M. Reyza Zulhidayat¹, Suharni Haris²,
Oksahil³, Restiawati⁴, Ahmad Dahlan Al
Haris⁵**

1,2,3,4,5]

Program Studi Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Muhammadiyah Buton, Kota
Baubau

***Korespondensi:**

Email :

rezazulhidayat27@gmail.com
arnyharis23@gmail.com
oksahilloksa@gmail.com
defresty@gmail.com
dahlanbhones@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 04/02/2024
Diterima : 06/02/2024
Diterbitkan : 07/02/2024

Abstrak

The movement power of a country to become more advanced or perhaps to become more backward is largely determined by how the leader influences the movement of that country, through the relationship between the leader himself and the people in a country, in carrying out his duties and responsibilities to realize the stability of the country. The ability to influence is determined by the leadership style applied by the leader to the circumstances or situations faced within the country, meaning that the leader can adapt his leadership style to the movement for change. Leadership style can increase the country's movement power to become dynamic following the progress that a country wants to achieve. Not afraid of change, even the changes are planned so that the country is able to compete with global changes. These leadership styles show variations in leadership or leadership dynamics that can bring about state stability. The research method is qualitative with observational data collection techniques.

Keywords, Leadership Dynamics Politic, State Stability.

Abstract

Daya gerak suatu negara menjadi lebih maju atau mungkin menjadi semakin mundur sangat ditentukan oleh bagaimana pemimpin mempengaruhi pergerakan Negara tersebut, melalui hubungan antara pemimpin itu sendiri dengan orang-orang yang ada dalam suatu negara, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan stabilitas negara. Kemampuan mempengaruhi ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin tersebut dengan keadaan atau situasi yang dihadapi dalam lingkup negara, artinya pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan gerakan perubahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dilengkapi dengan pendekatan analisis, konseptual, dan komparatif dengan mengutamakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Menurut hasil analisis gaya kepemimpinan dapat meningkatkan daya gerak negara untuk menjadi dinamis mengikuti kemajuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Tidak takut pada perubahan bahkan perubahan itu direncanakan agar negara mampu bersaing dengan perubahan global. Gaya-gaya kepemimpinan itulah yang menunjukkan variasi kepemimpinan atau dinamika kepemimpinan yang bisa mewujudkan stabilitas Negara.

Kata kunci : Dinamika Kepemimpinan Politik, Stabilitas Negara.



PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sistem politik tertentu, termasuk Indonesia. Sistem politik bagi setiap bangsa merupakan “urat nadi” yang menjadi saluran darah bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara yang sehat dan sejahtera. Fungsi sistem politik yang sehat dan sejahtera tertumpu pada harapan yang besar dari bangsa dan negara untuk mengartikulasi “aliran darah” bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai aspek kehidupan negara. Aspek-aspek dimaksud meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam. Tumbuh dan berkembangnya aspek-aspek tersebut ditujukan untuk memberi nilai tambah (value added) bagi masukan (input) sistem politik (negara) dalam mengisi dan membangun infrastruktur dan suprastruktur politik yang merupakan prasyarat dan syarat bagi terwujudnya tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Kondisi sistem politik dewasa ini sangat mengkhawatirkan, terutama ketika dimanfaatkan oleh sebagian (oknum) pemegang atau pelaku dalam pemerintahan yang memegang kendali pemerintahan di beberapa lini, hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dari kenyataan tersebut, terdapat ketimpangan di berbagai aspek dan sektor kehidupan. Akhirnya, jika kondisi seperti ini dibiarkan secara terus-menerus, kebobrokan dan kehancuran pasti akan terjadi. (Anggar 2013)

Dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terdapat istilah lpoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan) yang menjadi unsur stabilitas negara. Apabila salah satu saja dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi tentu dapat mengganggu stabilitas negara. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut diperlukan usaha dari berbagai pihak mulai dari lapisan masyarakat, aparaturnegara sampai pemerintah daerah maupun pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mohammad Mahfud MD melalui cuitannya di media sosial Twitter menjelaskan sebuah konsep bernama politik inspiratif.²³⁵ Istilah ini cukup asing di telinga karena belum ditemukan asal atau sumber dari istilah ini selain dari yang disampaikan oleh Mahfud MD baik melalui tulisan, seminar maupun wawancara. Setelah dikaji dan diteliti dengan saksama didapatkan kesimpulan bahwa “politik inspiratif” ini bisa menjadi solusi atau jalan alternatif untuk

mengatasi permasalahan perpecahan bangsa yang mengganggu stabilitas negara. (Firdaus and Kurnaini 2023)

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau study kepustakaan, untuk menarik data pada study kualitatif literasi dapat merujuk buku- buku, jurnal, penelitian yang telah di publis baik lokal maupun internasional, tulisan-tulisan ilmiah, penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan artikel-artikel yang baik di terbitkan di majalah maupun surat kabar. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yang memerlukan tinjauan literatur yang melibatkan pencarian bahan bacaan yang relevan dalam buku atau artikel (Creswell & Creswell, 2017). Metodologi studi literatur ini dipilih berdasarkan pengetahuan mendalam tentang fenomena yang dipilih. (Abadi and Arsil 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republic. Negara republik berarti negara dimiliki dan dikuasai oleh rakyat dan puncak kepemimpinan dan kedaulatan tertinggi juga ada di tangan rakyat. Presiden bertugas sebagai kepala negara atau dalam istilah lain menjadi ujung tombak atau manifestasi dari kepentingan rakyat. Segala keputusan dan aturanaturan yang dibuat oleh presiden harus berdasarkan dan mengedepankan kepentingan rakyat dan negara secara keseluruhan. Konsekuensi dari negara berbentuk republik adalah pemilihan presiden dan wakilnya yang harus dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). (Firdaus and Kurnaini 2023)

Dengan kondisi seperti ini potensi untuk timbulnya perpecahan jelas sangat besar terutama menjelang Pemilu 2024 ini. Persoalan yang biasa muncul adalah berkaitan dengan preferensi rakyat terhadap calon presiden pilihannya. Rakyat sering kali dihadapkan kepada dua atau lebih pilihan yang dibuat seolah saling berseberangan. Akibatnya rakyat menjadi terpecah pula menjadi kubu-kubu yang saling berseberangan berdasarkan pilihannya masing-masing. Bukan hanya sekadar mendukung dan menjunjung calon pilihannya, tetapi juga menjatuhkan dan menjegal calon lawannya. Tidak jarang pula terjadi permusuhan antar warga bahkan

antar saudara hanya karena perbedaan preferensi calon pemimpin. Polarisasi politik seperti ini tentu sangat tidak sehat dan merugikan stabilitas negara. Namun kondisi ini hanyalah salah satu dari banyak faktor yang bisa mengganggu stabilitas negara. DeRouen Jr. dan Goldfinch menemukan bahwa stabilitas suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; kapasitas negara dan fasilitas publik, pemerintahan yang baik dan kontrol korupsi, negara hukum/rasional, legitimasi, sekularitas, pembangunan dan kerentanan, demokrasi dan HAM.²³² Kusmanto mengemukakan bahwa kestabilan keamanan suatu negara menjadi dasar atau fondasi terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional. (Alvons 2018)

Abu Bakar mengemukakan teori strategi stabilitas negara dari Rasulullah ﷺ yang terbagi menjadi dua yaitu strategi dalam dan strategi luar. Strategi dalam adalah dengan mengadakan perjanjian damai dengan rakyat Madinah yang masih kafir, menjaga ketersediaan pangan penduduk dan menguatkan sektor ekonomi. Sedangkan strategi luar adalah dengan memperkuat bidang kemiliteran dan mengadakan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah di luar Madinah. (Firdaus and Kurnaini 2023)

Stabilitas adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung ke dalam, atau kembali kepada suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistem politik, atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau telah ditentukan. (Syahrul Romadon 2006)

Politik atau (politics) dapat diartikan juga sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan pengambilan pelaksanaan keputusan-keputusan. Politik juga mengandung makna kegiatan atau proses 'sistem politik' secara tidak langsung menunjukkan eksistensi tatanan atau pola-pola hubungan. Politik biasanya disamakan dengan penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan diantara individu dan kelompok sosial seperti pengambilan keputusan, pencarian kekuasaan, pengalokasian nilai, cakupan tujuan, pengendalian sosial, dan kegiatan yang menggunakan pengaruh. Tetapi dalam banyak percakapan dan pembicaraan, politik lebih mengacu dalam kebijakan-kebijakan umum dan alokasi. Dari berbagai definisi yang ada ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik, pertama : pandangan yang mengaitkan politik dengan

negara, kedua: pandangan yang mengaitkan dengan kekuasaan, otoritas, atau dengan konflik. (Syahrul Romadon 2006)

Demokrasi adalah konsep yang mengedepankan supremasi rakyat, dan pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara, menyiratkan penerapan sistem demokrasi. Negara yang mempraktikkan demokrasi semu adalah Singapura (Antriksa, 2014). Singapura masih diakui oleh dunia internasional sebagai negara yang menganut sistem demokrasi parlementer, namun dalam bidang politik dan pemerintahan, khususnya pada era Lee Kuan Yew, Singapura telah mengadopsi sistem yang lebih otoriter (Antriksa, 2014). Lee Kuan Yew adalah seorang pemimpin, dan dapat dikatakan berhasil membawa kemakmuran bagi komunitasnya. Dia meninggalkan Kantor Perdana Menteri dengan catatan PDB Singapura sebesar US\$ 14.000 (McCharty, 2006). Semua itu dicapai dengan menerapkan disiplin politik yang ketat pada pemerintah Singapura, seperti pemerintahan yang beradab tanpa korupsi. Selain itu, Li masih menjadi pemimpin, dia mendukung dan menggunakan ide-ide Machiavelli untuk menjadi pemimpin yang menakutkan. (Harapan Harahap 2022)

Stabilitas politik dapat dipahami sebagai kondisi dimana tidak ada timbulnya perubahan mendasar atau apa yang revolusioner dalam sistem politik (pemerintah), atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah ditentukan. Menurut Harold Crouch, stabilitas politik di tandai dengan dua hal, Pertama, adanya pemerintahan yang stabil dalam arti dapat memerintah bertahun-tahun atau dapat menjalankan programnya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Kedua, sistem pemerintahan stabil, dalam arti sistem tersebut mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan tidak merubah sistem pemerintahan yang ada.¹⁹ Sedangkan menurut Arbi Sanit, secara teoritis Stabilitas politik ditentukan oleh tiga variabel yang saling berkaitan, yaitu perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan kelembagaan baik struktur maupun proses politik dan partisipasi politik. Perkembangan ekonomi meliputi adanya tingkat pertumbuhan yang cukup dalam masyarakat. Sedangkan kelembagaan politik mengarah pada pengertian tidak timbulnya konflik antara kekuatan-kekuatan politik. Dan partisipasi politik lebih mengacu pada konsep partisipasi menurut pola pemerintahan dalam mana bentuk partisipasi lebih bersifat

'mobilized'. 20 Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan stabilitas politik adalah : Pola sikap dan tingkah laku segenap komponen sistem politik yang membangun kelestarian susunan struktur dan hubungan kekuasaan sehingga menjamin efektivitas pemerintahan.(Syahrul Romadon2006)

Sedangkan pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapat perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Berdasarkan masing-masing definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi.

Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri, yang dikenal dengan ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisa kebijaksanaan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan Negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya, seperti Portugis, Spanyol, Prancis, Jerman, dan sebagainya, pada abad XVIII dan XIX. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap tingkah laku manusia yang berbeda-beda: ilmu politik (political science) dan ilmu ekonomi (economics). Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Oleh karena sifat-sifatnya yang relative ketat ini ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan perhitungan kemuka. Para sarjana ekonomi dikatakan sepakat akan penggunaan istilah-istilah serta pengertian-pengertian dasar yang diperlukan untuk mencapai keseragaman analisa, hal mana memudahkan mereka bertukar pikiran tentang tujuan umum ilmu ekonomi, yaitu usaha manusia mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidup mereka. (Syahrul Romadon2006)

Untuk lebih memperjelas paling tidak terdapat tiga teori yang kiranya dapat menjelaskan mengenai hubungan politik dan ekonomi:

1.Asimetry

Ekonomi Politik mencoba menjelaskan tentang ketidakseimbangan atau ketimpangan yang terjadi antara bangsa-bangsa dan masyarakat dan juga penempatan pola-pola yang menjaga atau memelihara atau mengubah ketimpangan ini.

2. Interplay

Ekonomi politik mencoba menjelaskan tentang saling pengaruh mempengaruhi antara ekonomi dan politik. Model ini menganggap bidang politik dan bidang ekonomi sebagai sesuatu yang secara fungsional dapat dibedakan, tetapi mempunyai pengaruh resiprokal.

3. Deterministik

Ekonomi Politik mencoba menjelaskan tentang bagaimana politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan bagaimana institusi-institusi ekonomi menentukan proses-proses politik. Model ini memberikan gambaran yang pasti mengenai permasalahan yang ada serta menunjukkan dengan jelas apa yang harus dilakukan atau diubah(Syahrul Romadon 2006)

Dinamika perkembangan politik global dan regional merupakan keniscayaan, dan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa tekanan yang bisa merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Oleh karena itu diperlukan strategi pembangunan dengan mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan kondisi geostrategi Indonesia dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis terkini. Dinamika perkembangan politik global dan regional akhir-akhir ini masih diwarnai perebutan pengaruh dan kepentingan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat (AS) di beberapa kawasan, terutama di Asia. Sementara di kawasan regional Asia Tenggara, juga sedang berproses menyatunya negaranegara ASEAN melalui kesepakatan ASEAN Community (Komunitas ASEAN). Dari kedua dinamika perkembangan politik tersebut, perlu mewaspadaai pengaruh tekanannya terhadap geostrategi Indonesia, karena hal tersebut apabila tidak diantisipasi kemungkinan buruknya akan dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upayaupaya antisipasi dari pemerintah guna mengamankan geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia, agar proses perjuangan mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia dapat

berlangsung aman dan lancar. (Mayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M. 2017)

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhamad Syarif saat memberikan pembekalan calon kepala daerah di Sulawesi Utara (Sulut), Manado, Kamis, 12 April 2018. Tidak ada negara mana pun di dunia yang 92 kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. 12 Tahun 2017, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbanyak sepanjang sejarah: 19 kali. Dari jumlah OTT tersebut, KPK menetapkan 72 tersangka yang terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, dan pihak swasta. OTT oleh KPK diawali dengan penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada akhir Januari 2017, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan judicial review UU NO 41/2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan diakhiri dengan penangkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jambi pada akhir November 2017. Para pejabat legislatif dan eksekutif ini ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemprov Jambi tahun 2018. Lokasi OTT KPK tahun ini beragam dan menyebar. Tak hanya di Pulau Jawa, KPK menggelar OTT di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Kategori penanganan kasus sepanjang tahun 2017 terdiri dari 93 perkara penyuapan, 15 perkara pengadaan barang dan jasa, dan 5 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. (Kasih 2018)

Gagasan menata Partai Politik merupakan agenda yang sangat diperlukan, untuk meredam terjadinya instabilitas politik. Agar tercapainya stabilitas politik dalam bingkai Negara Hukum Demokrasi, tentunya Partai Politik harus memiliki fungsi dan peran yang mampu menjaga eksistensinya sebagai jembatan penghubung memperjuangkan aspirasi Rakyat. Eksistensi Partai Politik di Indonesia, diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan hukum yang berlaku. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta berhak mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin dalam UUD 1945, demi tercapainya cita-cita Negara Indonesia yang berdaulat, demokratis, adil dan makmur berdasarkan hukum. (Sanit 2015)

Rakyat sebagai kekuatan tertinggi dalam demokrasi, memiliki peran penting dalam pasang surut nilai-nilai demokrasi Negara Republik Indonesia, sehingga dibutuhkan suatu aturan-aturan yang pasti berdasarkan hukum. Dalam perkembangan

kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, Indonesia yang termasuk dalam Negara kepulauan memiliki berbagai macam suku, agama, budaya, dan ras yang majemuk, diperlukan adanya suatu wadah yang mampu mengakomodir setiap elemen-elemen yang ada di masyarakat, untuk meningkatkan peran fungsi pelayanan publik dan tanggung jawab publik menentukan arah kebijakan suatu Bangsa dan Negara. (Abadi and Arsil 2022)

Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seyogyanya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, baik itu penguasa, pemerintah, pengusaha dan rakyat kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk pada hukum (aturan main). Barang siapa yang menyimpang dari aturan main atau barang siapa yang mencoba memanipulasi aturan main dapat ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu. Kalau kesadaran akan logika demokrasi seperti itu sudah melembaga dan diinternalisasi oleh individu setiap anggota masyarakat, maka liberalism sebagai "roh demokrasi" justru akan mendatangkan harmoni dan kemajuan peradaban. Kebebasan berusaha (free enterprise), kebebasan bersaing (free fight), kebebasan bersuara dan kebebasan memilih afiliasi politik justru tidak akan mendatangkan kekacauan tetapi kesejahteraan sosial. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa kemajuan masyarakat terjadi kalau semua aktor sosial sadar akan aturan main tersebut. Seandainya salah satu pihak melanggar aturan main dalam praktek politik khususnya penunjang kekuasaan maka konsep liberalisme akan tereduksi dalam faham Darwinisme (Mangunwijaya, 1994).

Dalam faham Darwinisme tersebut konsep liberalisme dimaknai sebagai kebebasan yang tanpa batas, barang siapa yang kuat maka dialah yang akan eksis atau "survival of the fittest". Dalam faham ini orang boleh ngomong semauanya sendiri, partai boleh melakukan demagogi hingga kapasitas

maksimum, kekuatan politik boleh bertindak apa saja. Sehingga yang muncul bukan equilibrium sosial tapi kondisi yang chaos. Dalam konteks masyarakat yang sedang membangun dan memberdayakan rakyatnya bukan konsep liberalisme dalam pengertian Darwin ini yang perlu di introdusir, namun pengertian liberalisme dalam bingkai kesantunan dan kemaslahatan yang harus diadopsi dan dipelajari. Dengan suasana liberalisasi yang kondusif ini maka negara akan dapat menjalankan ideologi demokrasi secara lebih tertata dan konstruktif. Negara demokrasi ini akan dapat mengambil keputusan-keputusan dasar pemerintahannya yang tergantung sepenuhnya pada persetujuan bebas dari yang diperintah. Keterbukaan akan kritik juga merupakan syarat dari negara tipe ini, sehingga aspirasi masyarakat lapis bawah dapat mencuat ke permukaan dan digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah demi kemakmuran nasional. Institusi politik yang liberal merupakan syarat mutlak dari negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokratis. Liberalisasi atau demokratisasi merupakan dua hal yang secara total hidup dan berkembang di masyarakat. Demokrasi tidak dapat berjalan in vacuum, maksudnya demokrasi tidak dapat terjadi hanya pada sektor kehidupan politik saja, sementara sektor-sektor kehidupan lainnya tidak demokratis. Atau liberalisasi tidak dapat hanya berlaku dalam bidang ekonomi saja, sementara bidang politik tidak mengalami liberalisasi. (Nugroho 2015)

KESIMPULAN

Dengan melihat bahwa sering dari kebanyakan orang mengatakan bahwa ekonomi mempengaruhi politik dan atau politik yang mempengaruhi ekonomi, seandainya apabila kita beranjak dari sesuatu yang lebih sederhana dan kurang pretensius, barangkali sudah saatnya kita mencoba melihat masalah dengan tidak membuat kavling-kavling ekonomi dan politik, dan mencoba melihatnya secara lebih membumi. Sedikitnya ada dua alasan untuk membuktikan hubungan antara politik dan ekonomi bahwa bagaimanapun juga pembangunan ekonomi pada hakikatnya bergantung dan ditentukan oleh struktur dan proses politik yang ada.

Sistem politik Indonesia di bagi menjadi : Pertama, bisa disebut dengan masa Republik Indonesia I. dalam kurun waktu ini praktek demokrasi konstitusional sangat menonjolkan peranan

perlemen serta partai-partai politik. Praktek demokrasi semacam ini seringkali disebut dengan praktek demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Masa ini berlangsung dari tahun 1945 sampai tahun 1959 dengan tiga model undang-undang dasar sebagai dasar berpijak bagi praktek demokrasi. Kedua, bisa disebut dengan masa Republik Indonesia II, yaitu masa pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah dianggap menyimpang dari jiwa demokrasi konstitusional, walaupun secara formal diakui sebagai landasannya. Pelaksanaan demokrasi semacam ini menunjukkan pula beberapa segi demokrasi rakyat. Masa ini berlangsung antara tahun 1959 sampai tahun 1965. Ketiga, yaitu masa pelaksanaan demokrasi pancasila yang berlandaskan jiwa demokrasi konstitusional yang lebih menonjolkan sistem presidensial. Dan masa ini berlangsung antara tahun 1965 sampai dengan sekarang. Sedangkan sistem ekonomi Indonesia terbagi pada : ketika masa demokrasi liberal secara otomatis dalam bidang ekonomi kita memakai sistem ekonomi liberal. Selanjutnya lahir lah Sosialisme ala Indonesia dimana titik berat perekonomian Negara dibebankan pada perusahaan-perusahaan Negara. Kemudian pada masa Orde Baru mulai terjadi pergeseran dalam sistem perekonomian Indonesia, dari corak sosialis yang etatis pada masa ekonomi terpimpin ke arah ekonomi kapitalis.

Dari ketiga teori yang menjelaskan tentang hubungan politik dan ekonomi, teori deterministiklah yang kemudian menjelaskan fenomena-fenomena politik ekonomi yang terjadi pada masa Orde Reformasi, bahwa ekonom mempengaruhi politik atau pun sebaliknya bahwa stabilitas politik berpengaruh terhadap terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Politik inspiratif menurut Mahfud MD adalah menginspirasi dan mengajak sesama manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Semua indikator politik inspiratif yang disebutkan oleh Mahfud MD terdapat dalil dari hadis-hadis Nabi ﷺ yang mendukungnya. Implementasi dari politik inspiratif untuk mewujudkan stabilitas negara adalah dengan mengajak masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan sehingga akan tercipta masyarakat yang madani, bertakwa, berbudi luhur.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Songga Aurora, and Fitra Arsil. 2022. "Mekanisme Penetapan Ambang Batas

- (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2 (1): 11–35. <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1202>.
- Alvons, Maria. 2018. "KEBEBASAN KEAMANAN, Keadilan dan Keadamaian dalam Pemilihan Umum untuk Stabilitas Negara." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 15 (1): : 295-307.
- Anggar, sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Vol. 1. 1–364. cv cahaya setia.
- Firdaus, Rian Ahmad Ashab, and Mohammad Kurnaini. 2023. "PEMIKIRAN MAHFUD MD TENTANG POLITIK INSPIRATIF DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN IMPLEMENTASINYA UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS NEGARA." *AL-ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits* 1 (2).
- Harapan Harahap, Insan. 2022. *Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie* 1 (1): 1–13.
- Kasih, Ekawahyu. 2018. "Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
- Mayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M. 2017. "Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global Dan Regional."
- Nugroho, Heru. 2015. "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.
- Nurhayati, M. (2023). Komunikasi Politik dan Peran Media dalam Pemilihan Umum. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 1(2), 217–222. <https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.2154>
- Sanit, Arbi. 2015. "Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan." *Jurnal Politik* 1 (1): 155–76. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12>.
- Syahrul Romadon. 2006. "HUBUNGAN STABILITAS POLITIK DAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PADA MASA REFORMASI."